

**PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(PENETAPAN RENJA PD)**

TAHUN 2024



**KECAMATAN SUGIHWARAS
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023**

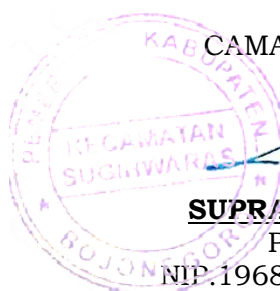
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023, kami telah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 Kecamatan Sugihwaras ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Sugihwaras, 14 Agustus 2023

CAMAT SUGIHWARAS


SUPRANATA, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I
NIP.19680921 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	1	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2	
1.4. Sistematika Penulisan	3	
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU		
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sugihwaras Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	4	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	10	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	11	
2.4. Review terhadap RANWAL RKPD	12	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15	
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN		
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16	
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA – PD	16	
3.3. Program dan Kegiatan PD	17	
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		22
BAB V : PENUTUP		26

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD.....	10
Tabel 2	Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras.....	10
Tabel 3	Tabel T-C.31 Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2023.....	13
Tabel 4	Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	15
Tabel 5	Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sugihwaras.....	17
Tabel 6	Tabel Program dan Kegiatan tahun 2023.....	20
Tabel 7	Tabel T-C.33 Rencana Program dan Pendanaan.....	22

LAMPIRAN

Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja PD Triwulan I (Form E.81)	
---	--

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sugihwaras merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Sugihwaras dalam periode Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2024 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2018-2023 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Rancangan Renja Kecamatan Sugihwaras memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sugihwaras Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja-PD) Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sugihwaras dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sugihwaras dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2023 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RANWAL RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Sugihwaras. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sugihwaras adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras Tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras dalam pelaksanaan Renja 2021 ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak terpenuhi karena adanya Pandemi Covid 19.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras dalam pelaksanaan Renja 2021 ada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,

- b. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah
 - c. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa Program/Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan kegiatan.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Sugihwaras pada umumnya
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Sugihwaras.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2021 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Sugihwaras, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sugihwaras

Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas								
			7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya anggaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			8	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	terlaksana lingkungan kantor yang nyaman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksana kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat listrik dan instalasi kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

			1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
--	--	--	--------	--	---	----------	----------	---	---	---	---	----------	------

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sugihwaras

Lembar : 2

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pegawai yang berwawasan luas dan selalu update berita terbaru	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhnya pelaksanaan kkoordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			1 9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksannya pelaksanaan kegiatan kecamatan dan pelayanan pada masyarakat	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			2 0	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			2 2	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum	terlaksananya rapat forpimda	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
			1 0	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan Mebeleur	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kelengkapan Kendaraan Dinas	24 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terwujudnya Kenyamanan perkantoran	24 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	0 1	0 3		Program peningkatan disiplin aparatur									
			5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	0 1	2 1		Program perencanaan pembangunan daerah									

			3 1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Desa	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
--	--	--	--------	---	--	----------	----------	---	---	---	---	----------	------

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sugihwaras

Lembar : 3

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	0 1	0 7		Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah									
			01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	jumlah Layanan Administrasi Umum dan dan Kepegawaian yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			03	Penyusunan Program dan Laporan	Jumlah Jenis Program dan Laporan yang disusun sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			04	Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Layanan Publik yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			05	Layanan Pemerintahan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemerintahan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			06	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			07	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			08	Layanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
7	0 1	0 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
			2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Jenis Dokumen / Laporan	16 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	16 dokumen	24,76%

				Kinerja Perangkat Daerah									
			2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	31,46%
			2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	480 unit	-	477 unit	300 unit	100%	0	300 unit	26,67%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sugihwaras

Lembar : 4

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	6 Laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	44,46%
			2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sesuai Kebutuhan	1 jenis	-	1 jenis	0 jenis	0 %	0	0 Jenis	00 %
			2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sesuai Kebutuhan	9 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100 %	3 jenis	6 jenis	29,35%
			2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	9 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	6 jenis	21,51%
7	0 1	0 2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
			2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	jumlah urusan yang dilaksanakan	24 kali	-	12 kali	12 kali	100%	0 kali	12 kali	33,22%
			2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	jumlah urusan yang dilaksanakan	156 kali	-	52 kali	52 kali	100%	52 kali	52 kali	34,31%
7	0 1	0 3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
			2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	34 kali	-	17 kali	17 kali	100%	0	17 kali	23,27%
			2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	58 kali	-	51 kali	51 kali	100%	0	51 kali	14,43%
7	0	0		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									

	1	4											
			2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	204 kali	-	200 kali	200 kali	100%	0	200 kali	100%
			2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	104 kali	-	100 kali	100 kali	100%	0	100 kali	100%
7	0 1	0 6		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa									
			2.0 1	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	- Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan - Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	113 kali	-	109 kali	109 kali	100%	0	109 kali	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Sugihwaras Tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sugihwaras. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sugihwaras dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian			100%	-	-	-	70,57%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Keuangan			100%	-	-	-	60,77%	-	-	-	
	Penyusunan Program dan Laporan			100%	-	-	-	57,39%	-	-	-	
	Pelayanan Umum			100%	-	-	-	31,64%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemerintahan			100%	-	-	-	44,42%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat			100%	-	-	-	47,27%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat			100%	-	-	-	77,11%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			100%	-	-	-	99,78%	-	-	-	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota											
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			-	100%	100%	100%	-	24,76%	100%	100%	

	Kinerja Perangkat Daerah											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	31,46%	100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah			-	100%	100%	100%	-	26,67%	100%	100%	
	Adminitrsasi Umum Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	44,46%	100%	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	0 %	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	29,35%	100%	100%	
No	Indikator	SPM/Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	21,51%	100%	100%	
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	33,22%	100%	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat			-	100%	100%	100%	-	34,31%	100%	100%	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	100%	100%	100%	-	23,27%	100%	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	14,43%	100%	100%	
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	100%	100%	100%	-	6,51%	100%	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			-	100%	100%	100%	-	0,30%	100%	100%	
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa											
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa			-	100%	100%	100%	-	14,21%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sugihwaras sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang dihadapi

Kecamatan Sugihwaras dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Sugihwaras dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sugihwaras serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat

Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sugihwaras diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100 %	2.743.521.567	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	3.282.601.450	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	4,016,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	8.295.300	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2,529,838,477	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2,889.323.343	DAU, DBH P, PAD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	3 unit	3,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	3 unit	3,600,000	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	12 Laporan	70,327,215	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	12 Laporan	236.535.767	PAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	64,047,840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	91.547.840	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	67,410,875	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	53.299.200	PAD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	447,205,500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	475.129.100	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kecamatan Sugihwaras	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	12 kali	12,692,600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kecamatan Sugihwaras	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	12 kali	20.616.100	PAD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Sugihwaras	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	52 kali	434,512,900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Sugihwaras	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	52 kali	454.513.000	PAD
3	Program Permerdayaan Masyarakat Dan Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100 %	8,615,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	43.395.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	17 kali	7,600,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	17 kali	20.150.000	PAD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	7 kali	1,015,000				7 kali	23.245.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	1,630,000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	50.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	640,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	12.720.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	990,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	kecamatan Sugihwaras	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	37.280.000	PAD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100 %	1,980,000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	33.588.550	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sugihwaras	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	4 kali	1,980,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sugihwaras	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	4 kali	33.588.550	PAD
JUMLAH				3,202,952,067	JUMLAH				3,884.714.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sugihwaras

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan sehingga dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sugihwaras dalam Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2023 adalah "**Peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar dan infrastruktur Perekonomian yang berorientasi pada potensi unggulan lokal**". Kecamatan Sugihwaras sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Sugihwaras memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi –instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Sugihwaras didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sugihwaras yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sugihwaras telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang “diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 adalah "**Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman,**

Sejahtera, dan Berdaya Saing”.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan, Kecamatan Sugihwaras mendukung **Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan Bertanggungjawab)** dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Sugihwaras memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sugihwaras untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sugihwaras selama kurun waktu jangka menengah lima tahun yang ingin dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sugihwaras
Kabupaten Bojonegoro

Visi : Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Bertanggungjawab			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Pemerintahan yang dapat diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP

			Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Ketrentaman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sesuai SOP
		Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Nilai SAKIP Kecamatan
			Serapan Anggaran

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Sugihwaras merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sugihwaras sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sugihwaras diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sugihwaras merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

b) Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sugihwaras diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

c) Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sugihwaras.

Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadapnya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sugihwaras diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sugihwaras sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja,

diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sugihwaras melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

f) Pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan Kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sugihwaras Tahun 2023 adalah 5 Program dengan 13 Kegiatan.

b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sugihwaras sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sugihwaras dan melingkupi semua Desa

c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.295.300
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.889.323.343
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.535.767
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.547.840

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.299.200
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.616.100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	454.513.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.150.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.23.245.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12.720.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	37.280.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.588.550
JUMLAH			3.884.714.100

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sugihwaras

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJASKPD
Pemerintahan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sugihwaras

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp.475.129.100				Rp.475.129.100			

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp. 20.616.100				Rp. 20.616.100		
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 10.650.000				Rp. 10.650.000	Rp. 12.650.000	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 3.400.000				Rp. 3.400.000	Rp. 5.000.000	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 6.566.100				Rp. 6.566.100	Rp. 6.566.100	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp. 454.513.000				Rp. 454.513.000		
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 454.513.000				Rp. 454.513.000	Rp. 458.891.100	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 43.395.000				Rp. 43.395.000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 20.150.000				Rp. 20.150.000		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 20.150.000				Rp. 20.150.000	Rp. 20.500.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan			Rp. 23.245.000					Rp. 23.245.000	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa	Rp. 23.245.000					Rp. 23.245.000	Rp. 25.500.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM			Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp. 12.720.000					Rp. 12.720.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa	Rp. 12.720.000					Rp. 12.720.000	Rp. 15.720.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Rp. 37.280.000					Rp. 37.280.000	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa	Rp. 37.280.000					Rp. 37.280.000	Rp. 38.280.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp. 33.588.550					Rp. 33.588.550	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa				Rp. 33.588.550				Rp. 33.588.550	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa.Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.530.100				Rp. 13.530.100	Rp. 14.370.100
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 20.058.450				Rp. 20.058.450	Rp. 25.000.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.282.601.450				Rp. 3.282.601.450	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 8.295.300				Rp. 8.295.300	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 4.016.400				Rp. 4.016.400	Rp. 4.016.400
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 4.278.900				Rp. 4.278.900	Rp. 4.278.900
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.889.323.343				Rp. 2.889.323.343	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ana TransferUmum-ana Alokasi Umum	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 2.759.841.343				Rp. 2.759.841.343	Rp. 2.759.841.343
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 129.482.000				Rp. 129.482.000	Rp. 129.482.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 236.535.767				Rp. 236.535.767	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 166.326.417	Rp. 164.924.000			Rp. 166.326.417	Rp. 166.326.417
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 31.452.350				Rp. 31.452.350	Rp. 33.452.350

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 2.995.000				Rp. 2.995.000	Rp. 3.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 32.162.000				Rp. 32.162.000	Rp. 35.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 91.547.840				Rp. 91.547.840	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 25.623.840				Rp. 25.623.840	Rp. 26.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 65.924.000				Rp. 65.924.000	Rp. 70.724.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 53.299.200				Rp. 53.299.200	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 37.749.600				Rp. 37.749.600	Rp. 37.749.600
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 4.549.600				Rp. 4.549.600	Rp. 5.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Sugihwaras, Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000				Rp. 11.000.000
Jumlah									Rp.3.719.790.100	Rp. 164.924.000			Rp. 3.884.714.100
									Kab. Bojonegoro, 2023 Camat Sugihwaras				
									<u>SUPRANATA,S.Sos,</u> MM. NIP. 196809211992021001				

BAB V PENUTUP

Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2018-2023 yang mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**. Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sugihwaras yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Sugihwaras. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sugihwaras didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Sugihwaras berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Sugihwaras berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sugihwaras Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sugihwaras Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sugihwaras Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

- 3) Rencana Tindak Lanjut.

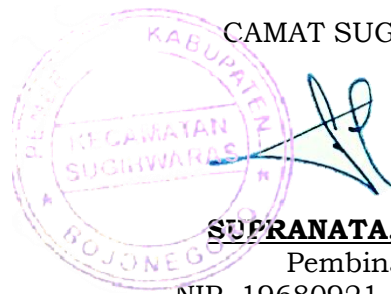
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sugihwaras selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sugihwaras. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sugihwaras Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber

pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Laporan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sugihwaras ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sugihwaras dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro.

Sugihwaras, 14 Agustus 2023

CAMAT SUGIHWARAS



SUPRANATA, S.Sos, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19680921 199202 1 001

LAMPIRAN

Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja PD Triwulan III
(Form E.81)

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN III TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH :KECAMATAN SUGIHWARAS

No	Tujuan/ Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra sampai pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renstra s.d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renstra s.d Tahun 2023 (%)	PD Penanggung Jawab		
															I	II		III		IV												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3						4	5	7	8		9		10		11		12		13	14 = 10+1 1+12 +13	15 = 14/9*100			16 = 8+14				17 = 16/7*10 0	18	
							UNSUR KEWILAYAHAN																									
							KECAMATAN																									
							KECAMATAN SUGIHWARAS																								KECAMATAN SUGIHWARAS	
	Tujuan PD : meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan							Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	80		79,55		80									0	-	0,00		79,55	-	99,44				
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan							Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum	4,8		4,7		4,8									0	-	0,00		4,7	-	97,92				
							Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu	8		7,9		8										0	-	0,00		7,9	-	98,75				

								Nilai kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif	8		7,9		8						0	-	0,00		7,9	-	98,75			
								Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya	4		4		4						0	-	0,00		4	-	100,00			
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	300	1.414.373.941	200	954.585.070	100	447.205.600	25	68.000.000	25	113.188.000	25	117.975.000	75	299.163.000	75,00	66,90	75	1.253.748.070	25,00	88,64
		7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	2	75.755.500	1	60.391.670	1	12.692.600	0	-	1	1.675.000	0	7.475.000	1	9.150.000	100,00	72,09	2	69.541.670	100,00	91,80
		7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	12	18.645.300	8	7.645.300	1	10.650.000	0	-	0	-	1	7.475.000	1	7.475.000	100,00	70,19	9	15.120.300	75,00	81,09
		7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2	7.110.200	1	5.067.600	1	2.042.600	0	-	1	1.675.000	0	-	1	1.675.000	100,00	82,00	2	6.742.600	100,00	94,83

		7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	2	50.00 0.000	1	47.6 78.7 70	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-			1	47.67 8.770	50,00	95,36				
		7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	15 8	1.338 .618. 441	104	894. 193. 400	52	43 4.5 13. 00 0	12	68.0 00.0 00	13	111 .51 3.0 00	13	1 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0		3 8	290.013. 000	73,08	66, 74	142	1.184 .206. 400	89,87	88,46				
		7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	8.194 .900	1	7.34 4.90 0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-			1	7.344 .900	100,0 0	89,63				
		7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 8	1.330 .423. 541	104	886. 848. 500	52	43 4.5 13. 00 0	12	68.0 00.0 00	13	111 .51 3.0 00	13	1 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0		3 8	290.013. 000	73,08	66, 74	142	1.176 .861. 500	89,87	88,46				
																						0	-			0	-						
																						0	-			0	-						
																						0	-			0	-						
																						0	-			0	-						
																						0	-			0	-						
																						0	-			0	-						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN																					7 3 , 0 8							82,4 4	9 5, 3 6				

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN										S e d a n g	S a n g a t R e n d a h											T i n g i	S a n g a t T i n g i																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program									adanya kegiatan rutin yang sesuai dengan perencanaan dan pihak terkait yang sudah komitmen untuk melaksanakan sesuai jadwal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program									sampai saat ini untuk program pelayanan publik tidak ada kendala/penghambat sama sekali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya									mengevaluasi triwulan sebelumnya agar bisa mencari solusi yang tepat untuk pelaksanaan triwulan selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD PD Tahun Berikutnya									melakukan perencanaan yang sesuai dengan waktu yang di tentukan dan selalu mengevaluasi kegagalan dalam penyerapan keuangan ataupun kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.								Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif		28,08		28,8		28,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

		7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1	15.17 1.600	1	14.4 90.0 00	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			1	14.49 0.000	100,0 0	95,51	
		7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	160.0 00	1	50.0 00	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			1	50.00 0	100,0 0	31,25	
		7	1	3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di bina	51	45.95 3.200	51	41.1 80.4 00	1	1.0 17. 200	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0 0	0,0 0	51	41.18 0.400	100,0 0	89,61	
		7	1	3	2.0 3	2	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	51	30.81 2.600	51	28.8 18.2 50	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			51	28.81 8.250	100,0 0	93,53	
		7	1	3	2.0 3	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	7	15.14 0.600	2	12.3 62.1 50	5	1.0 17. 200	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0 0	0,0 0	2	12.36 2.150	28,57	81,65	
1.	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program								adanya kegiatan rutin yang sesuai dengan perencanaan dan pihak terkait yang sudah komitmen untuk melaksanakan sesuai jadwal																						
2.	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program								sampai saat ini kegiatan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan																						

3.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								mengevaluasi triwulan sebelumnya agar bisa mencari solusi yang tepat untuk pelaksanaan triwulan selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD PD Tahun Berikutnya								melakukan perencanaan yang sesuai dengan waktu yang di tentukan dan selalu mengevaluasi kegagalan dalam penyerapan keuangan ataupun kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

		7	1	4	2.0 2		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	104	25.38 3.100	100	21.7 58.7 50	4	990 .00 0	0	-					4	950.000	100 ,00	95, 96	104	22.70 8.750	100,0 0	89,46				
		7	1	4	2.0 2	0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17	25.38 3.100	12	21.7 58.7 50	4	990 .00 0	0	-	4	950. 000	0	-			4	950.000	100 ,00	95, 96	16	22.70 8.750	94,12	89,46		
1.	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program								kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di jadwalkan dan di dukung oleh sumber daya masnusia yang memadai																							
2.	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program								sampai saat ini untuk program ketentraman dan ketertiban umum tidak ada kendala/penghambat sama sekali																							
3.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								mengevaluasi triwulan sebelumnya agar bisa mencari solusi yang tepat untuk pelaksanaan triwulan selanjutnya																							
4.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD PD Tahun Berikutnya								melakukan perencanaan yang sesuai dengan waktu yang di tentukan dan selalu mengevaluasi kegagalan dalam penyerapan keuangan ataupun kegiatan																							
		7	1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	300	101.9 80.05 0	200	87.1 51.6 00	100	1.9 80. 100	0	-	0	-		-			0	-	0,0 0	0,0 0	0	87.15 1.600	0,00	85,46		

		7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	118	101.9 80.05 0	110	87.1 51.6 00	8	1.9 80. 100	0	-	0	-	0	-			0	-		0,0 0	0,0 0	110	87.15 1.600	93,22	85,46	
		7	1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	2	8.805. 800	2	7.58 5.80 0	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-				2	7.585. 800	100,0 0	86,15	

		7	1	6	2.0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	22	9.986. 300	17	8.94 6.30 0	5	990 .00 0	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0 0	0,0 0	17	8.946. 300	77,27	89,59	
		7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17	8.402. 400	17	8.07 7.40 0	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			17	8.077. 400	100,0 0	96,13	
		7	1	6	2.0 1	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	12	58.10 4.700	12	48.1 84.7 00	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			12	48.18 4.700	100,0 0	82,93	
		7	1	6	2.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	17	8.457. 400	17	7.69 7.40 0	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			17	7.697. 400	100,0 0	91,01	
		7	1	6	2.0 1	1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	22	8.223. 450	17	6.66 0.00 0	4	990 .10 0	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0 0	0,0 0	17	6.660. 000	77,27	80,99	
																							0	-			0	-			
																							0	-			0	-			
																							0	-			0	-			
																							0	-			0	-			
																							0	-			0	-			

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN															50,000	100,00		85,19	96,46										
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN															Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi										
1.	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program								kesesuaian dalam merencanakan kegiatan dan penganggaran																				
2.	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program								terjadi kendala dalam menyusun surat pertanggung jawaban di karenakan banyaknya kegiatan yang masih di laksanakan seperti monitoring dan evaluasi ke desa- desa																				
3.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								mengevaluasi triwulan sebelumnya agar bisa mencari solusi yang tepat untuk pelaksanaan triwulan selanjutnya																				
4.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP PD Tahun Berikutnya								melakukan perencanaan yang sesuai dengan waktu yang di tentukan dan selalu mengevaluasi kegagalan dalam penyerapan keuangan ataupun kegiatan																				
																	0	-		0	-								
	Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan							Nilai kinerja aspek pengelolaan anggaran	6,4		6,08		6,24						0	-	0,00		6,08	-	95,00				
								Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan	21,6		20,52		21,06					0	-	0,00		20,52	-	95,00					
		7	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	300	8.794.844.141	200	4.662.046.639	100	2.734.392.825	25	295.830.067	25	948.101.730	25	538.014.11	75	1.781.945.987	75,00	65,17	75	6.443.992.626	25,00	73,27	

		7	01	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	1.905. 900	2	1.50 2.95 0	0	-	0	-	0	-			0	-			2	1.502. 950	100,0 0	78,86			
		7	01	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	2	1.633. 900	2	1.63 3.45 0	0	-	0	-	0	-			0	-			2	1.633. 450	100,0 0	99,97			
		7	01	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	21	16.11 2.550	5	10.2 36.4 00	5	4.2 78. 900	1	1.646 .000	0	-	0	-			1	1.646.000	20, 00	38, 47	6	11.88 2.400	28,57	73,75	
		7	01	1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1.671. 250	1	1.67 1.00 0	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			1	1.671. 000	100,0 0	99,99	
		7	01	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	3	7.669. 232.9 92	1	4.12 1.93 2.36 5	1	2.5 27. 391 .13 5	1	260.3 83.10 7	0	905. 343. 416	0	5 0 6 .4 6 2 .9 4 7			1	1.672.189.470	100 ,00	66, 16	2	5.794. 121.8 35	66,67	75,55	
		7	01	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	648	7.424. 507.3 92	216	3.96 4.35 8.76 5	216	2.4 40. 329 .13 5	54	247.1 43.10 7	54	892. 103. 416	5 4	4 8 6 .6 0 2 .9			1 6 2	1.625.849.470	75, 00	66, 62	378	5.590. 208.2 35	58,33	75,29	

		7	01	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	98.08 7.285	4	64.8 63.8 50	4	31. 452 .35 0	1	8.261 .850	1	6.45 4.60 0	0	-			2	14.716.450	50, 00	46, 79	6	79.58 0.300	50,00	81,13	
		7	01	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11	8.875. 000	8	5.88 0.00 0	3	2.9 95. 000	1	570.0 00	0	-	1	-			2	570.000	66, 67	19, 03	10	6.450. 000	90,91	72,68	
		7	01	1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	300.0 00	2	300. 000	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			2	300.0 00	100,0 0	100,00	
		7	01	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	58	88.91 2.000	54	55.9 00.0 00	4	32. 162 .00 0	1	3.760 .000	1	7.04 0.00 0	1	5 .4 7 0 .0 0 0			3	16.270.000	75, 00	50, 59	57	72.17 0.000	98,28	81,17	
		7	01	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1	360.0 00.00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-	0,00	0,00	
		7	01	1	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	360.0 00.00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-	0,00	0,00	
		7	01	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	9	195.1 34.14 0	3	117. 906. 461	3	71. 597 .84 0	1	11.40 2.575	1	23.1 16.6 14	1	9 .2 2 9 .6 1 8			3	43.748.807	100 ,00	61, 10	6	161.6 55.26 8	66,67	82,84	

		7	01	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	84.64 5.340	12	53.6 36.9 50	12	25. 623 .84 0	3	5.128 .607	3	5.70 5.65 9	3	2 . 9 5 5 . 6 4 8			9	13.789.914	75, 00	53, 82	21	67.42 6.864	58,33	79,66	
		7	01	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	110.4 88.80 0	36	64.2 69.5 11	24	45. 974 .00 0	6	6.273 .968	6	17.4 10.9 55	6	6 . 2 7 3 . 9 7 0			1 8	29.958.893	75, 00	65, 16	54	94.22 8.404	90,00	85,28	
		7	01	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	9	248.3 92.72 5	3	189. 561. 213	3	53. 299 .20 0	1	7.214 .035	1	4.69 9.60 0	1	1 5 . 9 5 1 . 6 2 5			3	27.865.260	100 ,00	52, 28	6	217.4 26.47 3	66,67	87,53	
		7	01	2	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	145.7 21.35 0	18	103. 698. 263	11	37. 749 .60 0	3	7.214 .035	2	3.63 4.60 0	4	4 . 9 5 1 . 6 2 5			9	15.800.260	81, 82	41, 86	27	119.4 98.52 3	93,10	82,00	
		7	01	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	13.89 9.600	17	9.20 5.00 0	7	4.5 49. 600	0	-	3	1.06 5.00 0	0	-			3	1.065.000	42, 86	23, 41	20	10.27 0.000	83,33	73,89	
		7	01	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15	88.77 1.775	10	76.6 57.9 50	5	11. 000 .00 0	0	-	0	-	5	1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0			5	11.000.000	100 ,00	10 0,0 0	15	87.65 7.950	100,0 0	98,75	

4.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD PD Tahun Berikutnya		melakukan perencanaan yang sesuai dengan waktu yang di tentukan dan selalu mengevaluasi kegagalan dalam penyerapan keuangan ataupun kegiatan